

Implementasi Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan: Studi Kasus Bidang Damkar Satpol PP Prov Jatim

Listia Permata A. S¹, Singgih Manggalaou²

^{1,2} Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
e-mail: 22041010109@gmail.com¹, Singgih.m.adneg@upnjatim.ac.id²

Abstrak

Penanganan kebakaran dan penyelamatan merupakan tugas penting pemerintah dalam menjaga keselamatan publik. Artikel ini membahas implementasi program penanganan kebakaran dan penyelamatan di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur. Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Damkar Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam menangani atau melakukan pencegahan kebakaran dan penyelamatan serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan secondary data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas. Namun, keterbatasan anggaran, fasilitas, dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran masih menjadi tantangan utama. Artikel ini menyarankan perlunya peningkatan alokasi anggaran, pengembangan program pelatihan, serta kampanye kesadaran publik untuk mendukung peran Bidang Damkar Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

Kata Kunci: *Kebakaran, Penyelamatan, Damkar, Satpol PP, Jawa Timur, Manajemen Bencana*

Abstract

Handling fire and rescue is an important government task in maintaining public safety. This article discusses the implementation of the fire and rescue handling program in the Fire and Rescue (Damkar), Civil Service Police Unit (Satpol PP) of East Java Province. This study aims to analyze the role of the East Java Province Satpol PP Damkar in handling or carrying out fire prevention and rescue as well as the obstacles faced in carrying out fire fighting and rescue tasks. The research method used is a descriptive qualitative approach with secondary data collection techniques. The research results show that coordination between agencies, use of technology, and increasing human resource capacity are the keys to successful implementation of tasks. However, limited budget, facilities and public awareness of fire prevention are still the main challenges. This article suggests the need to increase budget allocations, develop training programs, and public awareness campaigns to support the role of the East Java Province Satpol PP Fire Department in carrying out its duties optimally.

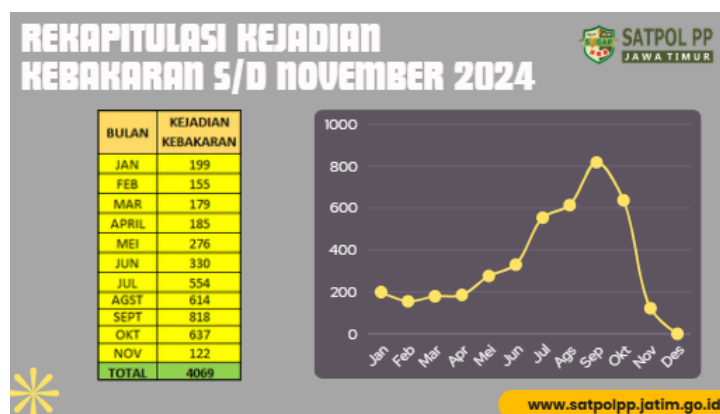
Keywords: *Fire, Rescue, Fire Brigade, Satpol PP, East Java, Disaster Management.*

PENDAHULUAN

Kebakaran adalah salah satu jenis bencana yang sering terjadi di berbagai daerah, terutama pada musim kering, tidak hanya pemukiman warga tetapi lahan kosong pun mengalami hal yang sama yang dapat menyebabkan kerugian signifikan baik dari segi materi, lingkungan, maupun korban jiwa sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi secara efektif, dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan industrialisasi yang pesat, risiko terjadinya kebakaran semakin meningkat, tantangan penanganan insiden penyelamatan lainnya, seperti evakuasi akibat bencana alam, kecelakaan, atau situasi darurat lainnya, turut menambah kompleksitas tugas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan (Damkar).

Bencana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa bencana yakni: “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.Sedangkan bencana kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah /pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pada pasal 1, menyatakan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota, Presiden di bantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Berdasarkan data laporan Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang dikutip dari data aplikasi Sijalinmaja laporan Kabupaten/Kota, menunjukan bahwa di Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/ kota dengan peringkat pertama kejadian kebakaran terbesar adalah Kota Surabaya dengan jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2024 sebanyak 321 kasus dari Januari hingga pertengahan Oktober 2024. Penyebab utama meliputi korsleting listrik dan pembakaran sampah yang tidak terkontrol. Pada bulan September, terjadi lonjakan kasus hingga 66 insiden, tertinggi sepanjang tahun, terutama di area alang-alang yang kering dan mudah terbakar Faktor cuaca panas ekstrem dengan suhu tinggi dan angin kencang turut memperparah situasi. Selain itu, kelalaian manusia, seperti meninggalkan peralatan elektronik menyala, menjadi penyumbang signifikan kebakaran rumah tangga. Berikut terdapat data rekapitulasi kejadian kebakaran pada Januari s/d November tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dari aplikasi Sijalinmaja fitur SidandiKeren:



Gambar 1. Rekapitulasi Kejadian Kebakaran bulan Januari s/d November tahun 2024
Sumber: Aplikasi Sijalinmaja Fitur Sidandikeren

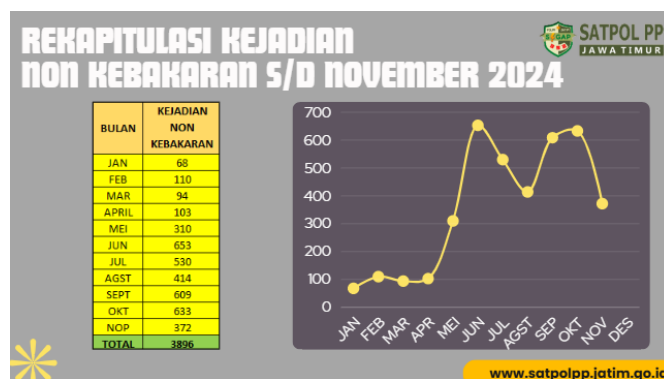
Gambar diatas merupakan rekapitulasi kejadian kebakaran dari bulan Januari hingga November saja dikarenakan masih menggu update data dari aplikasi Sijalinmaja melalui fitur Sidandikeren. Dari gambar diatas terdapat kenaikan yang signifikan dari bulan Agustus ke bulan September yakni dengan pencatatan kejadian kebakkaran sebanyak 818 kasus kebakaran. Tetapi, ketika memasuki musun hujan kejadian kebakaran mulai menurun dari bulan September ke bulan Oktober hingga bulan November.

Tabel 1. Jenis Objek Kejadian Kebakaran

JENIS OBJEK KEBAKARAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	TOTAL
BANGUNAN	140	116	119	125	144	149	180	154	215	178	63	1583
NON BANGUNAN	51	26	49	46	114	168	367	444	599	449	53	2366
KENDARAAN	8	13	11	14	18	13	7	16	4	10	6	120
JUMLAH	199	155	179	185	276	330	554	614	818	637	122	4069

Sumber: Aplikasi Sijalinmaja Fitur Sidandikeren

Tabel diatas menunjukkan apa saja kejadian kebakaran itu, yang dapat dipisahkan menjadi 3 kategori yakni; bangunan, non bangunan, dan kendaraan. Dapat kita lihat bahwa kejadian kebakaran yang paling signifikan adalah non bangunan yaitu berupa; sawah, perkebunan, hutan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, artikel ini sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana menangani kejadian kebakaran melalui peran Damkar Satpol PP Provinsi Jawa Timur.



Gambar 2. Rekapitulasi Kejadian Non Kebakaran (Penyelamatan) bulan Januari s/d November tahun 2024

Sumber: Aplikasi Sijalinmaja Fitur Sidandikkeren

Tabel 2. Jenis Objek Kejadian Non Kebakaran

JENIS OBJEK PENYELAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOP	TOTAL
HEWAN	58	91	72	75	269	504	387	285	417	458	292	2908
BARANG	7	8	12	14	25	56	78	61	85	78	22	446
MANUSIA	0	1	1	5	9	26	5	6	31	41	12	137
LAINNYA	3	10	9	9	7	67	60	62	76	56	46	405
JUMLAH	68	110	94	103	310	653	530	414	609	633	372	3896

Sumber: Aplikasi Sijalinmaja Fitur Sidandikkeren

Gambar 2. merupakan rekapitulasi kejadian non kebakaran bulan Januari s/d November tahun 2024 yang mengalami kenaikan drastic pada bulan juni sejumlah 653 kasus kejadian non kebakaran. Dapat kita lihat pada tabel 2. objek kejadian non kebakaran itu terbagi menjadi 4 kategori yakni; penyelamatan pada hewan, penyelamatan barang (seperti; cincin yang sulit terlepas dari jari), penyelamatan manusia, dan lainnya. Tetapi laporan membuktikan bahwa penyelamatan paling sering yaitu pada hewan sejumlah 2.908 kasus penyelamatan.

Sebagai salah satu unit di bawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bidang Damkar Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab utama dalam menangani kebakaran dan memberikan layanan penyelamatan kepada masyarakat. Tugas ini memerlukan kemampuan koordinasi, penggunaan teknologi modern, serta sumber daya manusia yang terlatih untuk merespons situasi secara cepat dan efektif. Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai tantangan seperti keterbatasan sarana, minimnya anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan kebakaran, serta koordinasi antarinstansi seringkali menjadi hambatan.

Upaya peningkatan kapasitas pelayanan Damkar sangat penting untuk menjawab tantangan tersebut. Implementasi strategi penanganan kebakaran dan penyelamatan yang baik dapat meminimalkan dampak bencana, meningkatkan rasa aman masyarakat, serta memastikan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan tugas Bidang Damkar Satpol PP Provinsi Jawa Timur, serta rekomendasi yang dapat memperbaiki kualitas layanan dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan di masa mendatang.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Bidang Damkar Satpol PP Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan kebijakan dan program penanganan kebakaran dan penyelamatan, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selain itu, penelitian

ini juga menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Bidang Damkar guna melindungi masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Manajemen Kebakaran

Menurut Haddow et al. (2014) dalam buku *Introduction to Emergency Management*, penanganan kebakaran memerlukan pendekatan sistematis yang mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Langkah-langkah ini penting untuk mengurangi risiko serta mempercepat pemulihan masyarakat pascakejadian. Pendekatan yang digunakan untuk memahami, mencegah, dan menangani kebakaran secara efektif. Teori ini mencakup konsep, prinsip, dan strategi yang bertujuan untuk melindungi manusia, properti, dan lingkungan dari dampak buruk kebakaran. Secara umum, teori manajemen kebakaran dibangun di atas tiga pilar utama: pencegahan, mitigasi, dan respons. Berikut adalah penjelasannya:

a. Pencegahan Kebakaran

Fokus utama dari pencegahan adalah mengurangi kemungkinan kebakaran terjadi. Elemen penting dalam pencegahan meliputi:

- **Identifikasi risiko:** Mengenali sumber potensial kebakaran, seperti instalasi listrik yang buruk, bahan mudah terbakar, atau aktivitas berisiko tinggi.
- **Pengendalian risiko:** Menghilangkan atau meminimalkan sumber bahaya, seperti mengganti bahan yang mudah terbakar dengan bahan yang lebih aman atau memastikan peralatan listrik terawat dengan baik.
- **Pendidikan dan pelatihan:** Memberikan pelatihan kepada individu atau organisasi mengenai cara mencegah kebakaran dan tindakan yang harus diambil saat darurat.
- **Kepatuhan regulasi:** Memastikan bahwa bangunan, industri, dan aktivitas mematuhi standar keamanan kebakaran.

b. Mitigasi Dampak Kebakaran

Mitigasi bertujuan untuk meminimalkan dampak apabila kebakaran terjadi. Strategi ini mencakup:

- **Desain bangunan yang tahan api:** Menggunakan bahan konstruksi yang tahan api dan mengintegrasikan sistem pemadam kebakaran, seperti sprinkler atau hidran.
- **Sistem deteksi dini:** Memasang alat pendeteksi asap dan sistem alarm yang dapat memberikan peringatan dini.
- **Perencanaan evakuasi:** Menyusun rencana evakuasi yang jelas dan terorganisasi untuk memastikan keselamatan penghuni.
- **Zonasi kebakaran:** Menerapkan zonasi dalam desain kota atau kawasan industri untuk mencegah penyebaran api.

c. Respons terhadap Kebakaran

Respons adalah tindakan yang diambil setelah kebakaran terjadi untuk meminimalkan kerusakan dan memastikan keselamatan. Komponen utama respons mencakup:

- **Tim pemadam kebakaran:** Memastikan keberadaan tim profesional yang dilatih untuk memadamkan kebakaran dan menyelamatkan korban.
- **Penggunaan alat dan teknologi:** Seperti alat pemadam api, drone untuk pemantauan, atau perangkat komunikasi canggih untuk koordinasi.
- **Komunikasi darurat:** Memberikan informasi kepada masyarakat atau penghuni gedung tentang langkah yang harus diambil.
- **Pemulihan pasca kebakaran:** Mengembalikan situasi ke kondisi normal, termasuk membersihkan area, memperbaiki infrastruktur, dan memberikan bantuan kepada korban.

Prinsip Penyelamatan dan Tanggap Darurat

Buku karya Dynes dan Quarantelli (1980), *Disaster Response and Emergency Management*, menjelaskan bahwa penyelamatan memerlukan koordinasi yang baik antar instansi, pengelolaan sumber daya yang efisien, serta pelatihan berkelanjutan untuk petugas agar dapat merespons situasi kritis secara cepat dan tepat.

Prinsip penyelamatan dan tanggap darurat bertujuan untuk melindungi nyawa, meminimalkan risiko cedera, dan mengurangi kerusakan pada properti saat menghadapi situasi darurat. Dalam penyelamatan, keselamatan penyelamat menjadi prioritas utama sebelum memberikan bantuan kepada korban. Proses evakuasi dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan jalur evakuasi yang aman dan peralatan penyelamatan yang memadai, serta memberikan prioritas kepada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Identifikasi korban yang membutuhkan pertolongan segera dan pelaksanaan triase medis menjadi bagian penting dalam penyelamatan. Sementara itu, tanggap darurat melibatkan koordinasi yang baik antara tim penyelamat, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan respons cepat terhadap situasi krisis. Langkah awal mencakup penilaian situasi, penerapan rencana darurat, dan pengendalian risiko lanjutan. Bantuan pertama diberikan kepada korban untuk mencegah kondisi semakin buruk, sementara evakuasi dilakukan dengan tertib menuju zona aman. Komunikasi yang jelas, pelatihan masyarakat, serta simulasi tanggap darurat berkala menjadi bagian integral dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas tanggapan terhadap bencana atau keadaan darurat lainnya.

Kebijakan dan Regulasi Nasional

Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Manajemen Kebakaran, setiap unit damkar diwajibkan memiliki standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan. SOP ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan kebakaran, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca-kejadian. Prosedur tersebut harus dirancang untuk menghadapi berbagai jenis kebakaran, seperti kebakaran bangunan, hutan, atau fasilitas industri, serta situasi darurat lain seperti kebocoran bahan kimia. SOP juga wajib mengatur langkah-langkah keselamatan kerja, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan pengelolaan komunikasi internal serta eksternal untuk memastikan koordinasi yang efisien selama operasi.

Regulasi ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran. Selain itu, regulasi ini juga mengharuskan unit damkar melakukan simulasi rutin dan pelatihan berkala guna meningkatkan kesiapan personel dalam menerapkan SOP di lapangan. Dengan kebijakan ini, diharapkan setiap unit damkar mampu memberikan layanan yang cepat, terkoordinasi, dan aman, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran secara optimal.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi penanganan kebakaran dan penyelamatan oleh damkar satpol pp Provinsi Jawa Timur. Sehingga, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan secondary data pada rekapitulasi kejadian kebakaran dan penyelamatan melalui aplikasi Sijalinmaja dengan adanya fitur SidandiKeren tahun 2024 bulan Januari s/d November. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mendetailkan dan menggambarkan fenomena yang diamati, dengan data sekunder sebagai basis utama analisis, memberikan wawasan mendalam terhadap konteks yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebakaran dan penyelamatan adalah dua aspek penting dalam manajemen bencana yang berfokus pada pengendalian api dan penyelamatan nyawa serta aset dari situasi berbahaya. Pengelolaan kebakaran dan penyelamatan membutuhkan perencanaan, pelatihan, serta sarana dan prasarana yang memadai. Dengan implementasi yang baik, dampak kebakaran dapat diminimalkan, baik dari sisi korban jiwa maupun kerugian material. Di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Timur Pelayanan puliknya bersifat tertutup atau transparan dalam melayani masyarakat. Penulis akan membahas lebih lanjut terkait pelayanan public pada salah satu bidang yang ada di Satpol PP Provinsi Jawa Timur yaitu Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DAMKAR). Dan bagaimana implementasi menangani kebakaran dengan sarana dan prasarana yang ada.

Tetapi sebelum itu, penulis akan menjelaskan apa itu sijalinmaja. Jadi, **SIJALINMAJA** adalah singkatan dari **Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kebakaran dan**

Penyelamatan di Indonesia yang biasanya digunakan oleh pemerintah atau instansi terkait dalam mengelola informasi dan penanganan kebakaran serta penyelamatan. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan kecepatan respon terhadap kejadian kebakaran serta kegiatan penyelamatan lainnya. Untuk damkar di aplikasi sijalinmaja ini terdapat fitur Sidandikeren yang khusus untuk damkar yakni berisi pelaporan kejadian kebakaran, penyelamatan, data Sarpras, respon time tiap Kabupaten/Kota se Jawa timur.

Dibawah ini terdapat data kejadian kebakaran yang direkap dari aplikasi Sijalinmaja melalui fitur Sidandikeren yakni 38 Kabupaten/Kota yang dinaungi damkar satpol pp provinsi Jawa timur pada tahun 2024 berjumlah dibawah ini:

Tabel 3. Kejadian Kebakaran di 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Jenis Objek			JUMLAH
	Bangunan	Non Bangunan	Kendaraan	
KABUPATEN BANGKALAN	18	36	4	58
KABUPATEN BANYUWANGI	66	46	5	117
KABUPATEN BLITAR	29	12	1	42
KABUPATEN BOJONEGORO	38	79	3	120
KABUPATEN BONDOWOSO	31	45	3	79
KABUPATEN GRESIK	87	400	5	492
KABUPATEN JEMBER	92	63	5	160
KABUPATEN JOMBANG	42	85	1	128
KABUPATEN KEDIRI	122	185	5	312
KABUPATEN LAMONGAN	61	68	7	136
KABUPATEN LUMAJANG	46	51	3	100
KABUPATEN MADIUN	33	57	2	92
KABUPATEN MAGETAN	19	4	1	24
KABUPATEN MALANG	79	45	3	127
KABUPATEN MOJOKERTO	8	1	1	10
KABUPATEN NGANJUK	81	86	9	176
KABUPATEN NGAWI	43	57	11	111
KABUPATEN PACITAN	24	12	1	37
KABUPATEN PAMEKASAN	40	142	1	183
KABUPATEN PASURUAN	42	68	3	113
KABUPATEN PONOROGO	44	50	3	97
KABUPATEN PROBOLINGGO	41	60	7	108
KABUPATEN SAMPANG	4	3	0	7
KABUPATEN SIDOARJO	158	379	5	542
KABUPATEN SITUBONDO	82	203	5	290
KABUPATEN SUMENEP	55	93	3	151
KABUPATEN TRENGGALEK	51	29	5	85
KABUPATEN TUBAN	58	42	3	103
KABUPATEN TULUNGAGUNG	39	39	3	81
KOTA BATU	36	29	3	68
KOTA BLITAR	26	5	2	33
KOTA KEDIRI	34	52	8	94
KOTA MADIUN	39	52	3	94
KOTA MALANG	73	52	5	130
KOTA MOJOKERTO	19	47	3	69
KOTA PASURUAN	20	43	0	63
KOTA PROBOLINGGO	29	84	1	114
KOTA SURABAYA	224	434	31	689
JUMLAH	2033	3238	164	

Sumber: Aplikasi Sijalinmaja Fitur Sidandikeren

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pasti ada kejadian kebakaran di tiap kabupaten/kota setiap tahunnya. Oleh karena itu, dengan adanya artikel ini dapat menjadi evaluasi Damkar Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam mengontrol ketersediaan sarana dan prasarana oleh tiap kabupaten/kota. Untuk itu berikut adalah data sarana dan prasarana tiap kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur

Tabel 4. Data Persediaan Sarpras di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur

Kab/Kota	Pompa Pemadam Portable	Mobil Pemadam	Mobil Rescue	Mobil Tangki Air	Jumlah Pos Pemad
KABUPATEN PACITAN	1	5	0	0	2
KABUPATEN PONOROGO	0	3	0	0	1
KABUPATEN TRENGGALEK	4	5	0	1	4
KABUPATEN TULUNGAGUNG	2	5	0	2	1
KABUPATEN BLITAR	2	5	1	0	1
KABUPATEN KEDIRI	2	4	1	0	1
KABUPATEN MALANG	6	8	1	1	2
KABUPATEN LUMAJANG	3	2	0	0	1
KABUPATEN JEMBER	0	5	0	0	4
KABUPATEN BANYUWANGI	4	5	1	4	3
KABUPATEN BONDOWOSO	6	4	0	0	1
KABUPATEN SITUBONDO	5	7	1	0	3
KABUPATEN PROBOLINGGO	0	4	2	2	2
KABUPATEN PASURUAN	0	7	0	1	1
KABUPATEN SIDOARJO	0	13	1	2	6
KABUPATEN MOJOKERTO	2	7	1	1	2
KABUPATEN JOMBANG	2	7	0	1	4
KABUPATEN NGANJUK	0	7	0	0	4
KABUPATEN MADIUN	0	4	0	1	2

KABUPATEN MAGETAN	0	5	0	0	2
KABUPATEN NGAWI	4	4	0	0	2
KABUPATEN BOJONEGORO	5	10	1	6	8
KABUPATEN TUBAN	0	7	0	0	3
KABUPATEN LAMONGAN	3	6	0	3	4
KABUPATEN GRESIK	1	7	0	0	3
KABUPATEN BANGKALAN	2	3	0	0	1
KABUPATEN SAMPANG	0	4	0	2	2
KABUPATEN PAMEKASAN	0	2	1	2	1
KABUPATEN SUMENEP	4	4	0	2	1
KOTA KEDIRI	5	3	0	1	1
KOTA BLITAR	0	4	1	1	1
KOTA MALANG	1	3	1	3	1
KOTA PROBOLINGGO	0	6	0	0	1
KOTA PASURUAN	4	4	2	2	1
KOTA MOJOKERTO	3	3	0	0	1
KOTA MADIUN	1	4	0	2	1
KOTA SURABAYA	34	86	0	0	21
KOTA BATU	3	5	1	2	1

Sumber: Aplikasi Sijalinmaja Fitur Sidandikkeren

Dilihat dari kejadian kebakaran dan ketersediaan sarana dan prasarana penulis dapat meninjau lebih jauh bagaimana implementasi penanganan kebakaran dan penyelamatan tersebut. Tetapi, sebelum itu berapa sih perkiraan waktu yang harus dilakukan pemadam kebakaran untuk sampai di tempat kejadian kebakaran. Jadi, Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Pemadaman Kebakaran (WPK) Tingkat Waktu Tanggap merupakan rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri. Jika suatu kejadian kebakaran yang berlokasi sangat jauh dari pos pemadam maka kebakaran tersebut dilakukan terlebih dahulu oleh masyarakat setempat atau juga Redkar (relawan pemadam kebakaran). Oleh karena itu, Studi ini mengidentifikasi beberapa strategi yang telah diimplementasikan oleh Bidang Damkar Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Yang pertama adalah Pemberdayaan Masyarakat dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

Pemberdayaan Masyarakat

Bidang damkar Satpol PP Prov Jatim dalam program pemberdayaan masyarakat melakukan Pembentukan RedKar (Relawan Pemadam Kebakaran). Redkar ini adalah salah satu inisiatif strategis untuk meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanggulangan kebakaran. Program ini bertujuan untuk menciptakan komunitas yang tangguh terhadap risiko kebakaran dengan melibatkan masyarakat sebagai garda terdepan. Relawan pemadam kebakaran dilatih secara khusus untuk memahami dasar-dasar pencegahan kebakaran, cara menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur evakuasi darurat. Selain itu, RedKar juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan dinas pemadam kebakaran dalam memberikan informasi awal saat terjadi insiden kebakaran.

Keberadaan RedKar memungkinkan respons yang lebih cepat di tingkat lokal, terutama di daerah dengan aksesibilitas yang sulit dijangkau oleh unit pemadam kebakaran profesional. Program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis masyarakat, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab kolektif terhadap keselamatan lingkungan, menjadikannya langkah penting dalam manajemen risiko kebakaran secara berkelanjutan.

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran

Pelayanan damkar selanjutnya yakni peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dengan berbagai cara seperti; Pelatihan, Bimtek, Diklat, Simulasi, dan Inspeksi. Pelayanan pemadam kebakaran tidak hanya bertumpu pada penyediaan peralatan yang memadai, tetapi juga pada peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran melalui berbagai program pengembangan kemampuan.

Salah satu upaya utamanya adalah melalui **pelatihan** yang bertujuan untuk memperkuat kompetensi teknis aparatur damkar. Pelatihan ini meliputi penggunaan alat pemadam kebakaran, teknik evakuasi korban, penanganan bahan berbahaya, dan keterampilan komunikasi dalam

situasi darurat. Melalui pelatihan ini, petugas dilatih agar mampu merespons dengan cepat dan tepat di lapangan, mengurangi risiko kerugian, dan memastikan keselamatan baik bagi korban maupun tim penyelamat.

Selain itu, **bimbingan teknis (Bimtek)** juga diberikan untuk meningkatkan pemahaman aparaturnya terhadap regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam Bimtek, petugas diajarkan untuk memahami peraturan terbaru terkait manajemen kebakaran, serta bagaimana menerapkannya dalam berbagai situasi, termasuk pengelolaan data kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, dan pengelolaan laporan insiden. Hal ini bertujuan agar pelayanan damkar tidak hanya berbasis teknis di lapangan, tetapi juga terintegrasi dengan administrasi dan pengambilan keputusan yang sesuai standar.

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) menjadi langkah strategis untuk membangun kapasitas aparaturnya secara menyeluruh. Diklat biasanya dirancang lebih komprehensif, mencakup teori dan praktik, dengan fokus pada pengembangan keterampilan kepemimpinan, pengelolaan risiko bencana, dan penggunaan teknologi terbaru dalam sistem pemadam kebakaran. Diklat ini sering kali bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau institusi terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna memastikan bahwa aparaturnya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang setara dengan standar global.

Selanjutnya, **simulasi** rutin menjadi bagian penting dari upaya peningkatan kapasitas. Simulasi kebakaran dirancang untuk menguji kesiapan personel dalam menghadapi skenario nyata. Simulasi ini biasanya dilakukan di berbagai lokasi seperti gedung perkantoran, fasilitas umum, atau kawasan industri, dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis petugas damkar, tetapi juga membangun koordinasi antarinstansi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tanggap darurat kebakaran.

Selain itu, **inspeksi rutin** dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah kebakaran. Aparaturnya dilatih untuk melakukan inspeksi terhadap bangunan, fasilitas umum, dan instalasi listrik guna mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran. Inspeksi ini sering disertai dengan edukasi kepada pemilik bangunan atau masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan yang harus dilakukan. Dengan adanya inspeksi yang berkala, risiko kebakaran dapat diminimalkan, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat. Melalui kombinasi pelatihan, bimtek, diklat, simulasi, dan inspeksi, pelayanan pemadam kebakaran diharapkan dapat semakin profesional dan mampu melindungi masyarakat secara efektif.

SIMPULAN

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Satpol PP Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan. Terutama dalam pencegahan penanggulangan kebakaran. Damkar Satpol PP Prov Jatim memiliki peran aktif dalam menghandle damkar kabupaten/kota untuk segala jenis pelatihan, bimbingan teknis, diklat, simulasi, dan inspeksi yang dilakukan oleh damkar Satpol PP Prov Jatim. Meskipun telah ada prosedur yang jelas dalam penanggulangan kebakaran, tantangan besar masih dihadapi, seperti keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana yang belum optimal, serta kondisi cuaca ekstrem yang memperburuk situasi kebakaran.

Upaya peningkatan kapasitas, melalui pelatihan petugas, penambahan peralatan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas operasional. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan kebakaran juga menjadi faktor penting. Secara keseluruhan, meski penanganan kebakaran di Provinsi Jatim telah menunjukkan kemajuan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk memastikan penanggulangan yang lebih cepat dan efisien di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assyilah, S. S. (2023). *Kolaborasi pelayanan program "ROTI 7 LAPIS" sebagai upaya aksi cepat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Dynes, R. R., & Quarantelli, E. L. (1980). *Disaster response and emergency management*.

- Endri, F. (2022). *Efektivitas kerja satuan tugas pemadam kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat).
- Guna, T. M. R. (2023). *Pertanggung jawaban risiko kerja pada karyawan pemadam kebakaran dalam perspektif akad ijarah 'Ala Al-Amal (Studi kasus pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry).
- Haddow, G. D., Bullock, J. A., & Coppola, D. P. (2014). *Introduction to emergency management*. Elsevier.
- Nirwana, T. (2024). *Analisis standardisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 50(2), 173-189.
- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana, mengkategorikan bencana kedalam beberapa jenis yakni: Bencana Alam; Bencana Non-Alam; dan Bencana Sosial.
- Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang Manajemen Kebakaran.
- Rianti, H. I., & Esfandari, D. A. (2019). Strategi komunikasi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam program pembinaan satuan relawan kebakaran Kota Bandung. *eProceedings of Management*, 6(3).
- Wahyuningsih, M. E., & Rachman, R. F. (2022). Implementasi kebijakan response time tujuh menit Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 6(3), 1500-1518.